

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi keuangan telah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Lembaga-lembaga pemerintahan saat ini, harus mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi, dalam hal ini masyarakat, menuntut agar dilakukannya akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut (Andriani, 2010).

Kawedar (2009) menyatakan, bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Contohnya masih banyak fenomena yang terjadi di laporan keuangan pemerintah daerah dengan menyajikan data-data yang tidak sesuai dalam peraturan dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara

periodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh handal, mengingat bahwa keterandalan merupakan salah satu unsur penting nilai informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbagai pihak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002:20).

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna memenuhi keinginan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka inilah, pemerintah daerah membutuhkan pelaporan keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan manajerial di bidang pemerintahan daerah. Dengan demikian, LKPD diharapkan mampu memberikan peranan pentingnya dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Literatur penjelasan teori dari reformasi di akuntansi sektor publik, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perkembangan studi empiris berdasarkan teori sains sosial, yaitu pada teori organisasi, berusaha menjelaskan perubahan dan reformasi organisasi yang diterapkan di sektor publik, termasuk sistem manajemen keuangan dan akuntansi (Caccia dan Steccolini, 2006). Lebih tepatnya, para penulis telah berusaha untuk memahami alasan adanya kesenjangan antara peraturan dan praktik akuntansi yang diterapkan oleh organisasi, yang bertujuan untuk memahami apakah reformasi dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Publik Baru diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan sebenarnya dari informasi dan sistem pelaporan akuntansi atau hanya untuk disesuaikan dengan persyaratan legislatif. Teori kontingensi dan institusional dapat digunakan untuk menjelaskan teori reformasi dalam akuntansi sektor publik, terutama mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kegunaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks entitas sektor publik yaitu pemerintah daerah.

Menurut Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam website resminya, mengungkapkan bahwa ke enam kalinya secara berturut-turut Kabupaten Banyumas menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pemkab Banyumas mendapatkan opini WTP berturut turut sejak tahun anggaran 2011.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, telah dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih, baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dari pemeriksaan oleh BPK, dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, 30 kabupaten/kota mendapat opini WTP dan 4 masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 masih dalam pemeriksaan. **(Humas Pemkab Banyumas, www.bupati.banyumaskab.go.id).**

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh penyajian laporan realisasi anggaran, efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dan kegunaan sistem informasi akuntansi terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan Nogueira dan Jorge (2016) menunjukkan bahwa faktor eksternal: efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dan penyajian laporan realisasi anggaran berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan, serta faktor internal: kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan Benito, Bastida dan Munoz (2010) menyimpulkan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran tidak diperhitungkan di kota yang tidak ada data pembayaran anggaran, yang

berarti awalnya memiliki. Namun Benito, Bastida dan Munoz (2010) memperlakukan file dengan menghapus data dari kota yang memiliki nilai negatif dalam pembayaran anggaran (penyajian laporan realisasi anggaran), yang menunjukkan kesalahan dalam informasi khusus Balai Kota.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirmala, Alfian dan Sari (2016) menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang mendukung adanya hubungan antara efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dengan tingkat kegunaan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Nogueira dan Jorge (2012) efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah penting untuk mendukung kegunaan sistem informasi akuntansi, karena menjamin keakuratan, peluang dan kehandalan.

Penyajian laporan realisasi anggaran pada hasil penelitian Nogueira dan Jorge (2016) berpengaruh positif, tetapi pada hasil penelitian Benito, Bastida dan Munoz (2010) tersebut menghasilkan bahwa berpengaruh negatif. Efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah pada hasil Nogueira dan Jorge (2016) berpengaruh positif, tetapi pada hasil penelitian Nirmala, Alfian dan Sari (2016) berpengaruh negatif. Kegunaan sistem informasi akuntansi pada hasil penelitian Nogueira dan Jorge (2016) berpengaruh negatif tetapi pada jurnal penelitian Nirmala, Alfian dan Sari (2016) penelitian tersebut menghasilkan bahwa berpengaruh positif.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, variabel yang perlu diteliti lebih lanjut adalah penyajian laporan realisasi anggaran, efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dan kegunaan sistem informasi

akuntansi. Hal ini terjadi karena masih terdapat perbedaan hasil yang tidak konsisten. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan lokasi (Negara), tahun penelitian dan jumlah sampel yang digunakan pada setiap penelitian.

Pentingnya penelitian ini dilakukan, karena untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan serta untuk mengetahui konsistensi variabel-variabel tersebut. Peneliti akan mengambil SKPD Kabupaten Banyumas dengan kriteria responden yang ditentukan untuk dijadikan sampel penelitian dan penulis menggunakan data primer. Mengapa memilih objek penelitian di Kabupaten Banyumas, karena berdasarkan website Pemkab Banyumas, mengungkapkan bahwa ke enam kalinya secara berturut-turut Kabupaten Banyumas menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul: Pengaruh penyajian LRA, efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dan kegunaan sistem informasi akuntansi terhadap pelaporan keuangan (Studi empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Banyumas).

B. Rurumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan realisasi anggaran berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan ?
2. Apakah efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan?
3. Apakah kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini dibatasi pada data penyajian LRA, efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dan kegunaan sistem informasi keuangan yang ada di LKPD. Objek penelitian dilakukan di SKPD dengan kriteria, yaitu 3 jenis responden yang telah ditentukan untuk penelitian di Kabupaten Banyumas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa penyajian laporan realisasi anggaran berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. Untuk Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kegunaan laporan keuangan pemerintah daerah melalui penyajian laporan realisasi anggaran, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, dan kegunaan sistem informasi akuntansi sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai.

b. Untuk Masyarakat

Bagi Masyarakat, dapat dijadikan sumber informasi di bidang akuntansi sektor publik untuk mengetahui kegunaan pelaporan keuangan LKPD di Kabupaten Banyumas.

c. Untuk Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

